

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARAT
PERANGKAT DESA DARI ASPEK KETELADANAN DESA PENDEM**

KOTA BATU

(STUDI KASUS DESA PENDEM)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penelitian



ANDREAS KANDA KOLONG

2018210030

**KONSENTRASI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

MALANG

2023

**ANDERIAS KANDA KOLONG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK, 2023**

**Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Perangkat Desa
Dari Aspek Keteladanan**

Pembimbing Utama : Dody Setyawan S. Sos., M.AP

Pembimbing Pendamping : Dr. Asih Widi Lestari., S.AP., M.AP

ABSTRAK

Persoalan pengangkatan perangkat Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu yaitu masih kurangnya profesionalisme, objektivitas, dan kompetensi kepala desa adalah salah satu dari banyak masalah menimpa seluruh desa di Kota Batu. Permasalahan yang muncul pada saat pemilihan Beberapa kerjasama kontraktual politik dengan Desa dan kelompok masyarakat sebelum terpilih telah berjanji untuk menjadi bagian dari perangkat Desa, yang menunjukkan kondisi tersebut terjadi, selain banyak individu yang ingin berpartisipasi dalam proses seleksi tetapi tidak diberikan ruang yang cukup untuk berkompetisi sesuai dengan kapasitas di bidangnya. nepotisme. Isu ini muncul karena tidak sedikit penduduk setempat yang harus ikut dalam siklus pemilihan untuk menjadi pemerintah kota.

Berbagai isu yang muncul dalam siklus pemilihan penunjukan pejabat di Kota Pendem, Kawasan Junrejo, Kota Batu, khususnya menjelang awal kantor pemerintah Kota Yang baru, Kamis 25 Januari 2018, disampaikan warga setempat keluhan terkait desain selama waktu yang dihabiskan untuk memilih dan menyaring otoritas kota Pendem Town, Junrejo Area, City Rock. Jelas ada kondisi yang dirancang karena apa yang terjadi baru-baru ini adalah bahwa satu pesaing untuk alat Kota didelegasikan di setiap bidang sebelum tes penyaringan dilakukan. Di setiap bidang, hanya satu orang yang mengikuti rekrutmen dan seleksi perangkat desa. Bagaimanapun, nama-nama yang telah lolos masih mengudara sebelum pelaksanaan siklus penentuan pendelegasian otoritas Kota. Ada klaim tentang favoritisme kepala kota terhadap pertemuan lokal tertentu yang terkait dengan bantuan politik dan perdagangan posisi alat kota yang sepenuhnya bermaksud untuk memperkuat situasinya dalam perlombaan politik kepala kota. Sentimen yang sama juga diungkapkan oleh aparat desa yang sudah lama menduduki jabatan tersebut. Ia mengaku disingkirkan sebelum akhir masa jabatannya dari aparat karena dianggap tidak mendukung Bupati. Untuk membedakan dan mengkaji Tugas Pemerintah Kota Pendem dalam Penunjukan Pemerintah Kota. menentukan dan mengevaluasi keabsahan pengangkatan pejabat pemerintah desa. Pemeriksaan sebelumnya dari Uswatun (2018) Komponen Penunjukan Majelis Mekanik Kota Sie di Rezim Bima Untuk mengetahui sistem pendelegasian alat kota Sie dalam Peraturan Bima. Jenis eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan subjektif.

KATA KUNCI: PERAN KEPALA DESA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), dengan bantuan dari pemerintah desa, dikenal sebagai perencanaan desa. Memperhatikan titik tolak dan adat istiadat yang dianggap dekat satu sama lain guna mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat. dan diperhatikan dalam peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Pemerintah Desa khususnya dan pimpinan organisasi secara keseluruhan menjadi perhatian utama masyarakat. Petunjuk Khusus Pedoman Tata Kota, Pedoman Pendeta Usaha Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2091),

Pengaturan perakitan mekanik diatur dalam Peraturan No. 6 Tahun 2014 tentang kota, Alat desa ditunjuk oleh lurah setelah berdiskusi dengan camat untuk Pejabat/ketua desa. Apalagi, pengaturan Pemkot tertuang dalam Pedoman Pendeta Rumah Tangga Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pedoman Pendeta Rumah Tangga Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembebasan Pemerintah desa menyatakan bahwa: Pemerintah Kota adalah komponen aparatur yang membantu Kepala desa dalam menyusun strategi dan koordinasi yang diwajibkan di Sekretariat desa, dan komponen pendukung kewajiban Kepala desa dalam melaksanakan pengaturan yang diwajibkan sebagai pelaksana khusus dan komponen daerah. Penataan pemerintahan desa di Indonesia sebagian besar melalui sistem yang telah ditentukan sebelumnya antara lain:

Usulan yang diberikan Camat bersifat sebagai pengesahan atau pemberhentian mengingat kebutuhan yang telah ditetapkan. Dalam hal Camat memberikan pengesahan, Kepala desa memberikan Surat Pernyataan Kepala desa tentang Penataan Kewenangan Desa; Dan. Jika usul Camat berisi pemecatan, maka Camat melakukan penjaringan dan penjaringan sekali lagi calon Perangkat desa

pendatang. Secara humanistik hal ini tidak benar, dimana cara yang paling umum untuk mendelegasikan alat desa di desa Pendem yang dilakukan oleh Kepala Kota hanyalah Sekretariat dan Kepala Badan Usaha (KAUR) yang sekarang berganti nama menjadi Kepala Desa, hanya dua komponen dari Perangkat Desa melalui tahapan penyaringan, penyaringan, pengujian dan baru ditunjuk/dipilih sebagai perangkat Desa dalam hal memenuhi semua persyaratan, sedangkan komponen lokal, misalnya Kepala Dusun dipilih secara beragam atau tidak. seperti Sekretaris dan Kepala Badan Usaha (KAUR) yang kini berganti nama menjadi Bagian Atas, penataan komponen provinsi tidak melalui sistem yang khas, namun yang pasti adalah kewenangan Lurah dan Lurah. diizinkan untuk memilih dan memilih sesuai penilaiannya.

Persoalan yang terjadi di berbagai Desa bahkan mencakup seluruh Desa di Kota Batu, salah satunya adalah persoalan pendelegasian aparat Kota Pendem, Daerah Junrejo, Kota Batu, khususnya tidak adanya skill dan objektivitas serta kemampuan yang luar biasa yang digerakkan oleh kepala desa. masih dapat diabaikan. Tantangan yang terjadi terkait keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh Lurah Pendem, khususnya dalam melakukan penetapan penataan perangkat Kelurahan di Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, karena tidak sedikit masyarakat yang perlu ikut serta dalam pemilihan untuk menjadi alat Kota, hal-hal yang terjadi selama siklus pemilihan perangkat desa, misalnya banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam interaksi penentuan namun tidak diberikan ruang yang cukup untuk bersaing sesuai kemampuan mereka di bidangnya, juga beberapa upaya bersama yang mengikat secara hukum politik dengan Kota dan pertemuan lokal sebelum dipilih telah bersumpah untuk menjadi salah satu alat desa yang menunjukkan keadaan untuk melatih nepotisme.

Berbagai isu yang muncul dalam siklus pemilihan penunjukan pejabat di Kota Pendem, Kawasan Junrejo, Kota Batu, khususnya menjelang awal kantor pemerintah desa yang disempurnakan, Kamis 25 Januari 2018, keluhan terkait disampaikan pihak setempat desain selama waktu yang dihabiskan untuk memilih dan menyaring otoritas kota Pendem Town, Junrejo Area, City Rock. Jelas ada kondisi yang dirancang karena apa yang terjadi baru-baru ini adalah bahwa satu pesaing untuk alat desa didelegasikan di setiap bidang sebelum tes penyaringan

dilakukan. Di setiap bidang, hanya satu orang yang mengikuti rekrutmen dan seleksi perangkat desa. Bagaimanapun, nama-nama yang telah lolos masih mengudara sebelum pelaksanaan siklus penentuan pendelegasian otoritas desa. Ada klaim tentang favoritisme kepala kota terhadap pertemuan lokal tertentu yang terkait dengan bantuan politik dan perdagangan posisi alat kota yang sepenuhnya bermaksud untuk memperkuat situasinya dalam perlombaan politik kepala desa. Sentimen yang sama juga diungkapkan oleh aparat desa yang sudah lama menduduki jabatan tersebut. Dia mengaku dibebaskan dari alat itu hanya sebelum masa jabatannya berakhir karena dianggap tidak membantu Walikota.

Berangkat dari gambaran diatas, penulis tertarik untuk mengarahkan eksplorasi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Dari Aspek Keteladanan”**

1.2 Rumusan Masala

1. Contoh yang baik tentang peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut di atas, berikut adalah tujuan penelitian:

1. untuk mempelajari dan mengkaji peran Pemerintah Desa Pendem dalam pemilihan perangkat desa.
2. menentukan dan mengevaluasi keabsahan pengangkatan pejabat pemerintah desa.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Berawal dari tujuan eksplorasi di atas, manfaat yang ingin dicapai dari pemeriksaan ini adalah:

1. Secara Akademik

Sebagai kebutuhan untuk mendapatkan sertifikasi empat tahun dalam manajemen kebijakan (S.AP) manajemen kebijakan di Personel Teori Sosial dan Politik, Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi, Malang.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi bagi Badan Permusyawaratan Kota (BPD) dan Camat, Dewan dan Jejaring terkait Tugas Pemkot Dalam Pelimpahan Kewenangan Kota di Kota Pendem

DAFTAR PUSTAKA

- Ajang, M. 2018. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa :Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Mulawarman, 35-36.
- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ance, F. 2018. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi: Tabalong.
- Sulaiman 2016* Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Perundang--Undangan Hukum Administrasi Undangan Hukum Administrasi Undangan Hukum Administrasi Undangan Hukum Administrasi Jurnal” Studi Islam dan Sosial 135-1584”
- Jumratul 2016* Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Everyone Is A Teacher Here Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI Di SMA NU Palangka Raya. Undergraduate Thesis, IAIN Palangka Raya.
- icayani, 2018* Sistem kami telah mendeteksi adanya lalu lintas yang tidak wajar dari jaringan komputer Anda. Laman ini memeriksa apakah benar-benar Anda yang mengirimkan permintaan tersebut, dan bukan robot. “<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=17937747174809000276&btnI=1&hl=id>”
- Riyadi 2002:138* Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Burhanudin 2000*. Etika Individual. Jakarta: Rineka Cipta Candiasa, I Made. Pengujian Instrumen Penelitian Disertai Aplikasi ITEMAN dan BIGSTEPS. Singaraja: Undiksha Press

Zainal ,. 2008. Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar. Makassar : FISIPOL

Eko, 2006:34. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013*

Soemarmo, D. 2004. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Sampurna Karunia.

Sugiyonno. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Suhindarno, H. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Sokorejo Kecamatan Bojonegoro. Fakultas Ilmu Sosial Negeri Yogyakarta: 12-12.

Thoha, M. 2005. Kepemimpinan Dalam Manajemen Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Waloyo. 2017. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa

Widodo. 2006. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.